



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN BUTON SELATAN



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BUTON

2019



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN BUTON SELATAN

2019

Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Buton Selatan 2019

ISBN : 978-602-5602-33-7

No. Publikasi : 74150.2005

Katalog : 4102002.7415

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xii + 36

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton

Gambar kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

La Ode Haris Sumba, SST

Penyunting:

Alinca Wedear Renutama, S.Tr.Stat

Penulis:

Siti Karimah, SST

Pengolah Data:

Siti Karimah, SST

<https://buselkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

“INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BUTON SELATAN 2019” diterbitkan pada tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton. Publikasi ini disusun dalam upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen data terkait data-data pembangunan manusia. Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah data primer hasil pengolahan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton dan data sekunder dari Instansi terkait. Adapula perbandingan antar wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat menunjukkan sejauh mana pembangunan manusia Kabupaten Buton Selatan dibandingkan kabupaten di sekitarnya.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kerjasama yang baik secara berkesinambungan dari berbagai sumber data, serta kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penerbitan publikasi seperti ini di masa yang akan datang.

Semoga publikasi ini dapat berguna dan memberi manfaat bagi konsumen data. Amin.

Pasarwajo, Juni 2020
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BUTON



La Ode Haris Sumba, SST

<https://buselkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KATALOG	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
 BAB 1 Pendahuluan	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	5
1.3 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 Metodologi	7
2.1 Konsep dan Definisi	7
2.2 Sumber Data	12
BAB 3 Kondisi Sosial	13
Ekonomi	
3.1 Kependudukan	13
3.2 Kesehatan	15
3.3 Pendidikan	17
3.4 Ketenagakerjaan	19
3.5 Perekonomian	20
BAB 4 Gambaran IPM	
Kabupaten Buton	
Selatan	23
4.1 Perkembangan IPM	23
4.2 Perbandingan antar Daerah	25
BAB 5 Penutup	35
5.1 Kesimpulan	35

<https://buselkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang digunakan dalam perhitungan	9
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015-2019	14
Tabel 3.2 Luas, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019	15
Tabel 3.3 Statistik Kesehatan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019	16
Tabel 3.4 Indikator Pendidikan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019	18
Tabel 3.5 Statistik Ketenagakerjaan Buton Selatan Tahun 2017-2019	19
Tabel 3.6 Tenaga Kerja Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019	20
Tabel 4.1 Komponen-komponen Penyusun IPM Kabupaten Buton Selatan Tahun 2010-2019	25
Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2019	27
Tabel 4.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2019	34

<https://buselkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 3.1 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019	14
Grafik 3.2 Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2019	21
Grafik 3.3 Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Makanan dan Non-makanan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2019	22
Grafik 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Selatan Tahun 2010-2019	24
Grafik 4.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2019	28
Grafik 4.3 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2019	29
Grafik 4.4 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2019	30
Grafik 4.5 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2019	32
Grafik 4.6 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2019	33

<https://buselkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan manusia secara umum memiliki makna yang sangat luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri berputar pada pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Adapun fokus utama dari ide dasar tersebut terletak pada poin manusia dan kesejahteraannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan hakiki bagi sebuah bangsa. Oleh karenanya, tujuan utama dari pembangunan manusia adalah menciptakan lingkungan yang mampu memberikan masyarakat kesehatan, umur yang panjang, dan kehidupan yang produktif. Hal ini tampak sangat sederhana namun nyatanya sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek manusia, contohnya mengumpulkan pendapatan.

Selama ini, seringkali yang menjadi tujuan utama bagi sebuah negara hanyalah mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Suatu negara akan dilabeli sebagai negara yang maju atau makmur apabila memiliki parameter keberhasilan kinerja ekonomi yang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Demi mencapai tujuan itu seringkali aspek kehidupan lainnya seperti kesehatan atau pendidikan menjadi terabaikan. Hal ini tidaklah mengherankan karena jauh sebelum konsep pembangunan manusia berkembang, konsep klasik pembangunan hanyalah berputar pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Konferensi Internasional bertema Asia 2015 di London pada 6-7 Maret 2006 paradigma pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selamanya efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Diperlukan sebuah parameter lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah pada kurun

waktu tertentu. Kemudian muncul sebuah paradigma baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi manusia atau lebih dikenal dengan pembangunan manusia.

Banyak alasan mengapa pembangunan manusia mendapatkan tempat yang istimewa dalam program pembangunan. Dalam sejarah di dunia terbukti bahwa sangat jarang negara yang mampu berkembang dan tumbuh hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimilikinya. Korea Selatan dan Korea Utara adalah sebuah contoh kontras keberhasilan dan kegagalan pembangunan. Korea Utara jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan yang miskin sumber daya alam tetapi sukses dalam mengembangkan sumber daya manusia. Di samping itu pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dianggap mampu mengurangi kemiskinan menjadi kurang efektif tanpa diimbangi dengan pengurangan kesenjangan pendapatan. Fakta lainnya yaitu di Amerika Latin membuktikan bahwa tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan telah menghambat potensi-potensi pertumbuhan ekonomi. Masalah itu sebagian besar timbul karena negara-negara Amerika Latin cenderung mengabaikan investasi pada manusia, khususnya rumah tangga miskin. Akibatnya, saat kesempatan ekonomi meluas, kelompok rumah tangga ini tertinggal dan pada gilirannya menimbulkan masalah sosial.

Perbaikan kesenjangan hanya bisa dicapai dengan melakukan investasi pada pembangunan manusia, baik dalam meningkatkan akses dan kualitas di bidang pendidikan maupun meningkatkan akses, kualitas, dan layanan di bidang kesehatan.

Pembangunan manusia adalah suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Di antara pilihan-pilihan hidup yang terpenting adalah pilihan untuk hidup sehat, untuk menikmati umur panjang dan sehat, untuk hidup cerdas, dan berkehidupan mapan.

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu:

- **Produktivitas.** Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
- **Ekuitas.** Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
- **Kesinambungan.** Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi.
- **Pemberdayaan.** Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan tanpa mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Tingkat capaian pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian dari penyelenggara negara agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat diukur dan dibandingkan. Terdapat berbagai ukuran pembangunan manusia yang telah dibuat, namun tidak seluruhnya dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran standar yang dapat digunakan untuk perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan pengukuran pembangunan manusia akan menjadi sulit untuk dianalisis. Sehingga, diperlukan pemilihan faktor-faktor yang paling utama yang mampu menggambarkan dengan baik nilai pembangunan manusia yang telah dicapai. Adapun dua faktor penting yang dinilai efektif dalam pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini dianggap sebagai

kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks komposit ini terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi hidup sehat dan umur panjang. Indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan output dari dimensi pendidikan. Indikator pengeluaran per kapita disesuaikan untuk menjelaskan dimensi ekonomi dan hidup layak.

Untuk memperoleh indeks pembangunan manusia yang tinggi diperlukan adanya fasilitas pendukung guna mengoptimalkan ketiga dimensi tersebut bagi tiap daerah. Berdasarkan pengalaman pembangunan manusia di beberapa negara, untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan dengan distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh sukses adalah Korea Selatan yang tetap konsisten mengaplikasikan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil harus mengalami kegagalan karena ketimpangan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan (UNDP, Bappenas, BPS, 2004).

Saat ini isu perkembangan pembangunan manusia telah ditanggapi serius oleh pemerintah Indonesia dan perkembangannya pun kini semakin positif. Hal ini ditandai dengan dijadikannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (*fiscal gap*) dan memacu percepatan pembangunan di daerah. Alokator lain yang digunakan untuk mendistribusikan DAU adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks

Kemahalan Konstruksi (IKK). Dengan adanya DAU diharapkan daerah yang mempunyai IPM rendah mampu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang mempunyai IPM lebih baik karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan dari masing-masing daerah apakah mampu memanfaatkan kucuran dana yang ada untuk mencapai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia secara lebih baik.

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Selatan 2019” ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kondisi, posisi dan perkembangan-pembangunan manusia serta komponen-komponen penyusunnya dibandingkan dengan daerah lain dan periode sebelumnya.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penyusunan publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai gambaran secara umum perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Buton Selatan. Hal ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi sebagian kebutuhan data untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan manusia dan dapat menjadi masukan dalam penyusunan rencana kebijakan selanjutnya.

1.3 Sistematika Penulisan

Pada Bab 1 akan diuraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan dan sistematika penulisan publikasi ini. Kemudian di Bab 2 akan diulas mengenai metodologi, yang terdiri dari konsep definisi, meliputi IPM, angka harapan hidup (AHH), angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan daya beli. Selain itu juga akan ada ulasan terkait sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini. Selanjutnya pada Bab 3 akan dibahas terkait kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Buton Selatan yang meliputi gambaran kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan

dan perekonomian. Ulasan mengenai perkembangan IPM beserta perbandingan antar daerah akan dibahas pada Bab 4. Kemudian Bab 5 adalah penutup yang berisi kesimpulan.

<https://buselkab.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

2.1 Konsep dan Definisi

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan; dan kehidupan yang layak.

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*). Oleh karena itu, pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*).

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertama kali dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia pada suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM mempunyai manfaat antara lain:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara;

- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibangun oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ketiga dimensi ini mempunyai pengertian yang luas terkait indikator-indikator pengukurannya. Pada dimensi kesehatan, digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dalam pengukurannya. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP).

Indikator-indikator tersebut merupakan indikator baru dalam perubahan metodologi penghitungan IPM. Perubahan metodologi penghitungan ini didasarkan pada beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan lagi. Seperti angka melek huruf, sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita juga tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu, perubahan juga terjadi pada rumus penghitungannya, yang semula menggunakan rata-rata aritmatik, berubah menjadi rata-rata geometrik.

Adapun rumus penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Nilai indeks yang dihasilkan, dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yakni:

- a. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$

- b. Kelompok “tinggi” : $70 \leq \text{IPM} < 80$
- c. Kelompok “sedang” : $60 \leq \text{IPM} < 70$
- d. Kelompok “rendah” : $\text{IPM} < 60$

Layaknya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan IPM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1})}{\text{IPM}_{t-1}}$$

Berikut standar nilai yang digunakan BPS dalam penghitungan IPM berdasarkan UNDP.

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang Digunakan dalam Penghitungan

Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan
	Maks	Min	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Harapan Lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352*	1.007.436**	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Keterangan: *) Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris), yaitu di Kabupaten Tolikara, Papua.

**) Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran perkapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Sumber: BPS 2016

2.1.2 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Meningkatnya AHH dapat diartikan bahwa terdapat keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi dan membaiknya kesehatan masyarakat beserta lingkungannya.

Rumus yang digunakan dalam menghitung dimensi kesehatan adalah sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Harapan lama sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)* dan rata-rata lama sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)* digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan/pendidikan. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Sedangkan RLS menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal yang pernah dijalani. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. RLS

juga dapat digunakan sebagai indikator kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dalam suatu wilayah.

Dimensi pendidikan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

2.1.4 Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP)

Badan Pusat Statistik mengukur dimensi standar hidup layak menggunakan indikator rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao. Berikut rumus penghitungan yang digunakan:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

2.1.5 *Shortfall*

Membandingkan antara capaian yang telah ditempuh pada suatu periode tertentu dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai suatu titik ideal dalam menganalisis IPM, digunakanlah suatu penghitungan yang disebut *shortfall*. Capaian suatu indikator dikatakan “cepat” apabila nilai *shortfall* di atas 1,7 dan dikatakan “menengah” apabila nilai *shortfall* di atas 1,5. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{I_t - I_{t-1}}{100 - I_{t-1}} \times 100$$

Keterangan :

r : *Shortfall*

I_t : Indeks pada tahun t

I_{t-1} : Indeks pada setahun yang lalu atau pada tahun $t-1$

2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data yang dimiliki seksi Neraca, berupa data IPM dan indikator penyusunnya. Selain itu, data-data sosial ekonomi lainnya bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Kemudian data gambaran umum Kabupaten Buton Selatan dalam publikasi Buton Selatan dalam Angka.

BAB III

KONDISI SOSIAL EKONOMI

3.1 Kependudukan

Penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan faktor penting dan berperan besar dalam proses pembangunan. Dengan adanya penduduk, sumber daya alam dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkesinambungan. Indonesia memiliki populasi penduduk sekitar 260 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia dapat menjadi potensi dan memberikan manfaat yang besar jika memiliki kualitas yang baik, namun kualitas sumber daya manusia yang rendah menjadi hambatan dan beban bagi Indonesia dalam proses pembangunan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia tentu saja akan tidak mampu mengelola sumber daya alam secara maksimal. Upaya pemerintah dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia merupakan tantangan yang besar bagi Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, diperlukan suatu kebijakan dan strategi pembangunan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan indikator-indikator kependudukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang cepat.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 berkisar 80.784 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 96,83. Artinya, dari 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 96 hingga 97 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Buton Selatan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

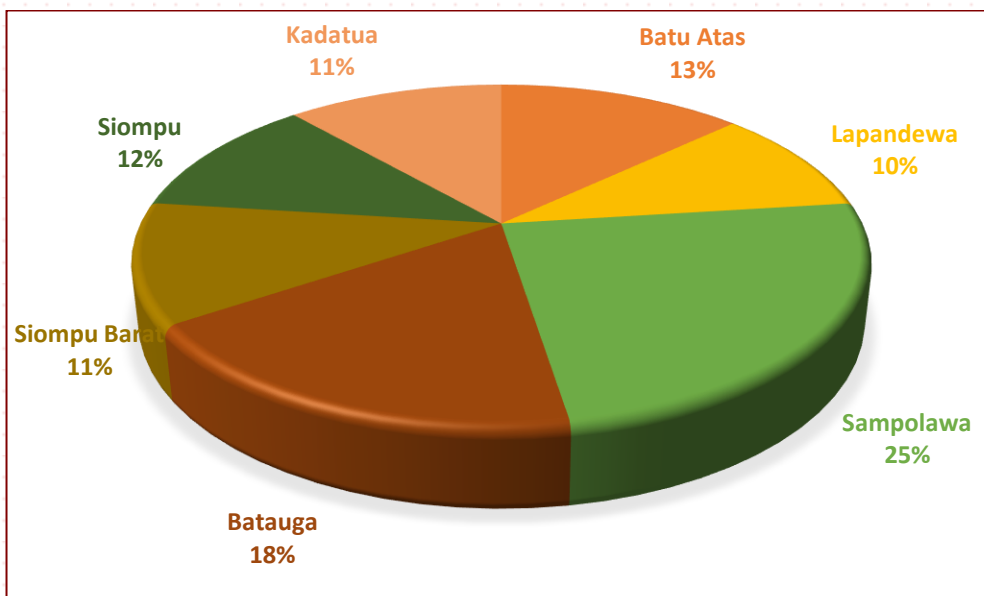
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Penduduk			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	37.994	39.283	77.277	96,72
2016	38.462	39.756	78.218	96,75
2017	38.860	40.193	79.053	96,68
2018	39.328	40.651	79.979	96,75
2019	39.741	41.043	80.784	96,83

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2020

Jika melihat menurut kecamatan, penduduk terbanyak pada tahun 2019 terdapat di Kecamatan Sampolawa yang menyumbang 25 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Buton Selatan atau sebanyak 24.062 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling kecil terdapat di Kecamatan Lapandewa yang menyumbang 10 persen dari total penduduk di Buton Selatan atau sekitar 9.841 jiwa.

Grafik 3.1 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019



Sumber: Kabupaten Buton Selatan dalam Angka 2020

Tabel 3.2 Luas, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Batu Atas	9,19	12 764	1.389
Lapandewa	89,67	9 841	110
Sampolawa	221,95	24 062	108
Batauga	148,53	17 795	120
Siompu Barat	14,58	11 230	770
Siompu	38,62	11 314	293
Kadatua	24,04	11 271	469
Jumlah	546,58	98 277	180

Sumber: Kabupaten Buton dalam Angka Tahun 2020

Persebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Buton Selatan terlihat belum merata. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan yang cukup timpang. Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa Kecamatan Batu Atas merupakan kecamatan terpadat, dimana kepadatan penduduknya mencapai 1.389 jiwa tiap km². Sedangkan Kecamatan Lapandewa merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 110 jiwa tiap km². Hal ini dikarenakan kondisi geografis di Kecamatan Lapandewa, dimana dengan wilayah yang luas sebagian besarnya merupakan kebun dan hutan.

3.2 Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Buton Selatan terbilang sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh telah tersedianya rumah sakit, praktik dokter, apotek, posyandu, hingga puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan. Adanya fasilitas kesehatan ini, ditunjang juga oleh tersedianya tenaga medis yang cukup. Berikut data statistik kesehatan Kabupaten Buton Selatan.

Tabel 3.3 Statistik Kesehatan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019

Uraian	Batu Atas	Lapan-dewa	Sampo-lawa	Bata-uga	Siom-bar	Siom-pu	Kada-tua	BUTON SELATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fasilitas Kesehatan								
Rumah Sakit	-	-	-	1	-	-	-	1
Puskesmas	1	1	3	1	1	1	1	9
Posyandu	13	10	33	24	13	20	11	124
Apotek	-	-	1	3	1	-	-	5
Tenaga Kesehatan								
Bidan	5	5	15	15	8	10	12	70
Perawat	8	9	25	22	9	10	7	90
Dokter	1	1	5	2	4	1	4	18
Ahli Gigi	2	-	-	4	3	1	3	13
Farmasi	4	4	7	4	4	2	4	29

Sumber: Kabupaten Buton Selatan dalam Angka Tahun 2020

Sampai dengan tahun 2019, terdapat satu rumah sakit di Kabupaten Buton Selatan yaitu RSUD Kab. Buton Selatan. Sedangkan untuk puskesmas sudah tersebar di seluruh kecamatan yaitu masing-masing sebanyak satu unit di Kecamatan Batu Atas, Lapandewa, Batauga, Siompu Barat, Siompu, dan Kadatua, serta tiga unit di Kecamatan Sampolawa. Ketersediaan fasilitas terbanyak adalah posyandu yaitu sebanyak 124 unit. Sedangkan untuk apotek baru terdapat di Kecamatan Sampolawa, Batauga, dan Siompu Barat.

Selain fasilitas kesehatan, hal yang sangat mendukung adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis sebagai subjek yang melakukan pengobatan dan penanganan medis. Pada tahun 2019, sebaran dokter, bidan, dan perawat sudah merata di seluruh kecamatan di Kabupaten

Buton Selatan yaitu sebanyak 18 dokter, 70 bidan, dan 90 perawat. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sampolawa yaitu sebanyak 5 dokter, 15 bidan, dan 25 perawat. Untuk ahli gizi tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Lapandewa dan Sampolawa, dengan yang terbanyak sebanyak 6 ahli gizi di Kecamatan Pasarwajo dan 4 ahli gizi di Kecamatan Batauga. Untuk jumlah tenaga farmasi sudah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Buton Selatan dengan jumlah 7 tenaga di Sampolawa, dua di Siompu dan empat di masing-masing kecamatan lainnya.

3.3 Pendidikan

Edgar Faure, ketua *The International Commission for Education Development*, pada tahun 1972 menyuarkan sebuah program yang ide dasarnya adalah pembangunan manusia jangka panjang atau dikenal dengan *long life education*. Dalam program tersebut, Edgar menekankan bahwa menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi setiap warganya merupakan tugas negara yang paling penting. Indonesia, jauh sebelum Edgar menyuarkan idenya tersebut, telah lebih dahulu meletakkan pendidikan sebagai salah satu tujuan pembangunan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia sebuah pesan penting terkait dengan kemajuan bangsa Indonesia. Pesan yang terkandung dalam tujuan bangsa Indonesia itu ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan sebuah perjuangan dan usaha melalui kegiatan pendidikan. Dari rumusan Pembukaan UUD 1945 tersebut maka lahirlah Pasal 31 UUD 1945 yang dengan sangat jelas mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Diantaranya adalah dengan menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Maksud dan tujuan

pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

Tabel 3.4 Indikator Pendidikan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019

Uraian	2019
(1)	(2)
Sekolah	
SD/MI	75
SMP/Mts	41
SMA/MA/SMK	25
Guru	
SD/MI	826
SMP/Mts	874
SMA/MA/SMK	532
Murid	
SD/MI	12.343
SMP/Mts	6.445
SMA/MI/SMK	5.104
Rasio Murid/Guru	
SD/MI	15
SMP/Mts	7
SMA/MA/SMK	10
Rasio Murid/Sekolah	
SD/MI	165
SMP/Mts	157
SMA/MA/SMK	204
Angka Partisipasi Sekolah	
7-12	99,59
13-15	96,42
16-18	49,02

Sumber : Kabupaten Buton Selatan dalam Angka Tahun 2020

Pada tahun 2019, APS 7-12 tahun Kabupaten Buton Selatan sebesar 99,59 persen, artinya hampir seluruh penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Buton Selatan sedang bersekolah. Kemudian sekitar 96 persen penduduk Buton berusia 13-15 tahun sedang bersekolah. Sedangkan untuk

kelompok umur 16-18 tahun di Kabupaten Buton Selatan kurang dari separuh penduduk yang sedang bersekolah, tepatnya sebesar 49 persen. Semakin tinggi kelompok umurnya semakin kecil angka partisipasi sekolahnya. Hal ini karena pada umumnya, menjelang usia remaja hingga dewasa, beberapa anak (terutama anak laki-laki) putus sekolah untuk bekerja agar membantu kebutuhan ekonomi keluarga.

Tingkat partisipasi sekolah ini ditunjang oleh tersedianya fasilitas pendidikan yang berupa 141 sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dimana setiap sekolah rata-rata menampung 150 hingga 210 murid. Selain itu terdapat 2.232 guru yang tersebar di seluruh Kabupaten Buton Selatan, dimana setiap guru rata-rata mengajar 7 sampai dengan 15 murid.

3.4 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Buton Selatan pada Agustus 2019 sebanyak 31,8 ribu orang, naik 0,8 ribu orang dibanding Agustus 2018. Sejalan dengan naiknya angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,78 persen poin. Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk Buton Selatan yang bekerja naik sebesar 752 orang.

**Tabel 3.5 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2017-2019**

Uraian	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
TPAK (%)	62,02	64,04	64,82
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,61	3,52	3,77
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,39	96,48	96,23

Sumber : Sakernas Kabupaten Buton Selatan, 2017-2019

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional, dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang sebesar 111 orang namun TPT naik menjadi 3,77 persen. Kenaikan TPT ini diikuti penurunan kesempatan kerja menjadi 96,23 persen. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT diploma merupakan yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,1 persen, kemudian disusul TPT Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,7 persen.

Menurut lapangan pekerjaan utamanya, persentase terbesar berada pada lapangan usaha Pertanian yaitu sekitar 47 persen penduduk atau sekitar 14.345 pekerja, dengan dominasi pekerja laki-laki. Lapangan pekerjaan terbesar kedua di Kabupaten Buton Selatan berada pada sektor Jasa yaitu sebesar 37 persen atau sekitar 11.431 pekerja, dengan tenaga kerja laki-laki yang lebih banyak dibanding tenaga kerja perempuan. Diikuti sektor industri pengolahan atau manufaktur sebesar 16 persen atau sekitar 4.839 pekerja. Di setiap lapangan usaha, tenaga kerja laki-laki selalu mendominasi.

Tabel 3.6 Tenaga Kerja Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019

Lapangan Usaha Tiga Kategori	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	8.813	5.532	14.345
Industri Pengolahan/Manufaktur	2.984	1.855	4.839
Jasa	6.049	5.382	11.431
Total	17.846	12.769	30.615

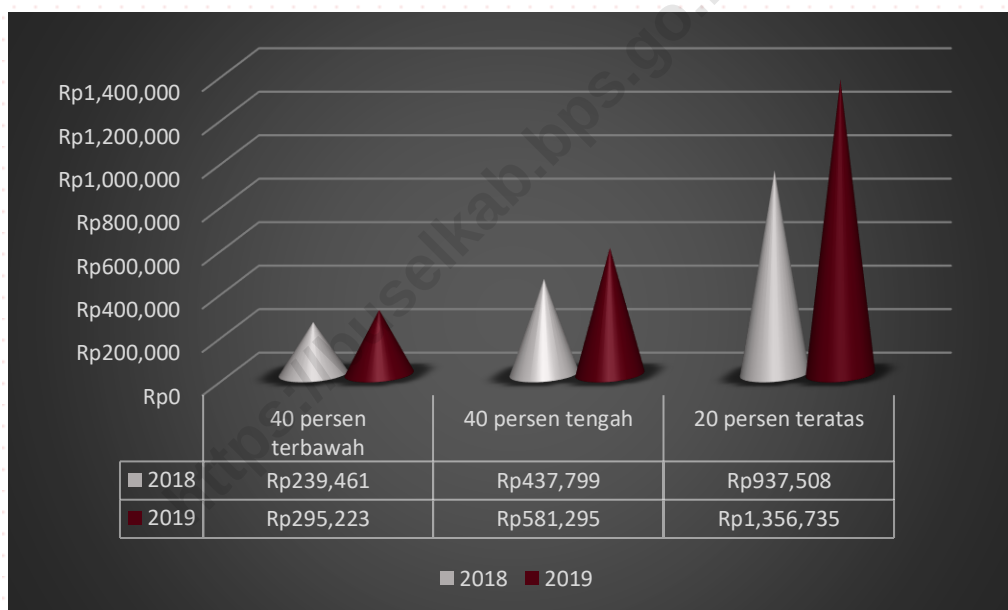
Sumber : Sakernas Kabupaten Buton Selatan, Agustus 2019

3.5 Perekonomian

Jika dilihat dari besarnya pengeluaran perkapita, tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya pengeluaran perkapita untuk setiap golongan pengeluaran. Untuk golongan

pengeluaran 40 persen terbawah, pengeluaran perkapita penduduk Buton Selatan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp. 295.223 dari sebelumnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 239.461. Untuk golongan pengeluaran 40 persen tengah, pengeluaran perkapita pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp. 581.295 dari Rp. 437.799 pada tahun 2018. Dan untuk pengeluaran perkapita penduduk golongan 20 persen teratas, naik menjadi Rp. 1.356.735 dari Rp. 937.508 pada tahun 2018.

**Grafik 3.2 Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2018-2019**



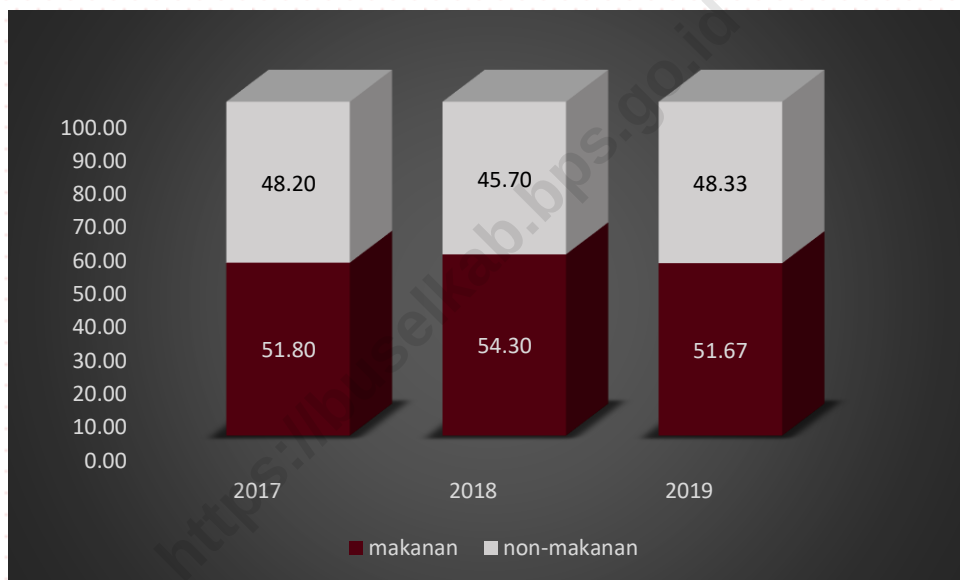
Sumber : Susenas Tahun 2018-2019

Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat melalui proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan dibandingkan non-makanan. Berdasarkan Grafik 3.3 di bawah ini, persentase pengeluaran untuk makanan masih lebih besar daripada non-makanan selama tiga tahun terakhir. Ini berarti bahwa sebagian pendapatan penduduk lebih besar dialokasikan untuk pengeluaran makanan.

Pada tahun 2018, perbandingan pengeluaran perkapita untuk makanan dibandingkan non makanan sebesar 54,3 : 45,7. Kemudian proporsi

pengeluaran untuk makanan menurun pada tahun 2019 menjadi 51,7 : 48,3. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Selatan mengalami kenaikan yang disebabkan proporsi konsumsi makanannya semakin menurun daripada dua tahun tahun sebelumnya. Sebaliknya, proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi non makanan semakin menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Grafik 3.3 Persentase Pengeluaran Penduduk untuk Makanan dan Non-makanan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2019



Sumber : Susenas Tahun 2017-2019

BAB IV
GAMBARAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KABUPATEN BUTON SELATAN

4.1 Perkembangan IPM

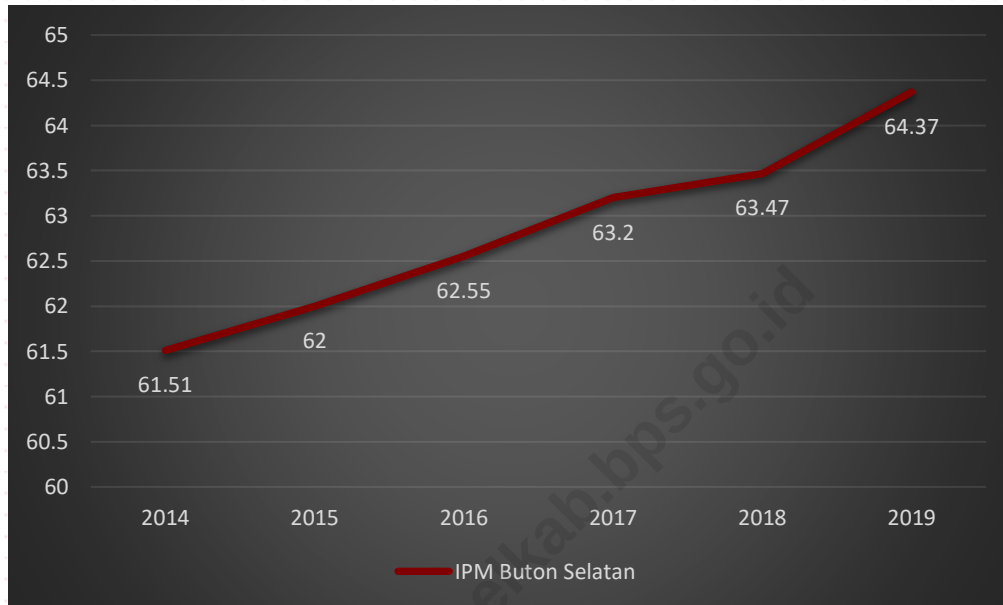
Tujuan utama pembangunan adalah terciptanya lingkungan yang mendukung masyarakat dapat menikmati umur panjang, sehat dan produktif dalam menjalani kehidupan. Tujuan ini akan dapat tercapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan tinggi, serta memperoleh pendapatan yang cukup untuk menunjang kehidupannya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur pembangunan, tidak terkecuali pembangunan di Kabupaten Buton. IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Sedangkan komponen-komponen tersebut bervariasi untuk tiap kabupaten/kota. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari yang semula 61,51 pada tahun 2014, meningkat secara perlahan menjadi 64,37 pada tahun 2019. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pada komponen-komponen penyusun IPM itu sendiri. Apa yang telah dicapai, tidak

terlepas dari peran pemerintah dalam komitmennya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

**Grafik 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2010-2019**



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada tahun 2014 hingga 2019, nilai IPM Kabupaten Buton Selatan yang berkisar antara 60 sampai dengan 70, yang berarti berada dalam kategori IPM sedang. Selama periode 2014-2019, IPM Kabupaten Buton Selatan meningkat sebesar 2,86 poin dengan rata-rata pertumbuhan 0,57 persen setiap tahunnya. Peningkatan level tertinggi IPM di Kabupaten Buton Selatan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,9 poin sehingga mendapatkan indeks sebesar 64,37 dimana sebelumnya berada pada 63,47 di tahun 2018.

Melihat dari capaian setiap komponen IPM pada tabel 4.1, harapan hidup penduduk Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 mencapai usia 67 tahun hingga 68 tahun. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan penduduk di Kabupaten Buton Selatan sudah cukup baik. Dari sisi pendidikan, harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 mencapai 12,94 tahun, atau dapat diartikan harapan penduduk bisa menikmati pendidikan sampai dengan tamat SMA sederajat hingga Diploma I. Sedangkan rata-rata lama sekolahnya hanya 7 tahun atau setara dengan sekolah menengah

pertama (SMP) tetapi tidak sampai tamat. Selanjutnya dari sisi pengeluaran, rata-rata pengeluaran setiap penduduk di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 sebesar Rp 7,29 juta setahun atau Rp 607.750 sebulan.

Tabel 4.1 Komponen-komponen Penyusun IPM Kabupaten Buton Selatan Tahun 2014-2019

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014	67,2	12.52	6,35	6.571	61,51
2015	67,2	12.53	6,55	6.715	62,00
2016	67,2	12.54	6.81	6.859	62,55
2017	67,2	12.55	7.06	7.075	63,20
2018	67,3	12.56	7.07	7.192	63,47
2019	67,5	12.94	7.32	7.293	64,37

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

4.2 Perbandingan Antar Daerah

Pembangunan daerah tidak dapat lagi bertumpu hanya pada peningkatan produksi atau peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebab, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya dengan melalui sektor perekonomian saja. Kondisi kependudukan yang terkait dengan peluang untuk hidup panjang, dapat berpartisipasi dalam mengenyam pendidikan, dan menikmati hidup yang layak dinilai akan lebih mampu digunakan sebagai paradigma pembangunan. Hal ini dikarenakan pembangunan yang berorientasi pada manusia merupakan tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat pembangunan.

Penerapan otonomi daerah yang dimulai sejak masa reformasi, yakni pada tahun 1999, menyebabkan setiap daerah mulai belajar untuk membangun daerahnya secara mandiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa setiap daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah ini menyebabkan roda pembangunan dalam pelaksanaannya terfokus pada wilayah kabupaten/kota. Tak terkecuali pembangunan manusia yang diulas pada pembahasan ini, dimana untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu diukur pada masing-masing kabupaten/kota, tidak terkecuali Kabupaten Buton Selatan.

Untuk melihat sejauh mana tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Buton Selatan, perlu adanya perbandingan dengan wilayah lain, dalam hal ini kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, bisa juga dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai angka yang dapat mempresentasikan angka rata-rata kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Melihat tren dari tahun 2014 sampai dengan 2019, angka IPM Kabupaten Buton Selatan menunjukkan tren yang positif. Akan tetapi, kondisi IPM di Kabupaten Buton Selatan masih di bawah angka IPM Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten disekitarnya, Kabupaten Buton Selatan tergolong cukup rendah, bahkan menempati peringkat keenam belas atau peringkat dua terbawah, berada di atas Buton Tengah.

Kota yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Kendari dengan IPM sebesar 82,86. Posisi kedua ditempati oleh kota yang bersebelahan dengan Buton Selatan yaitu Kota Baubau yaitu sebesar 75,12. Kemudian disusul oleh Kabupaten Kolaka yang menempati ranking ketiga yaitu sebesar 71,29.

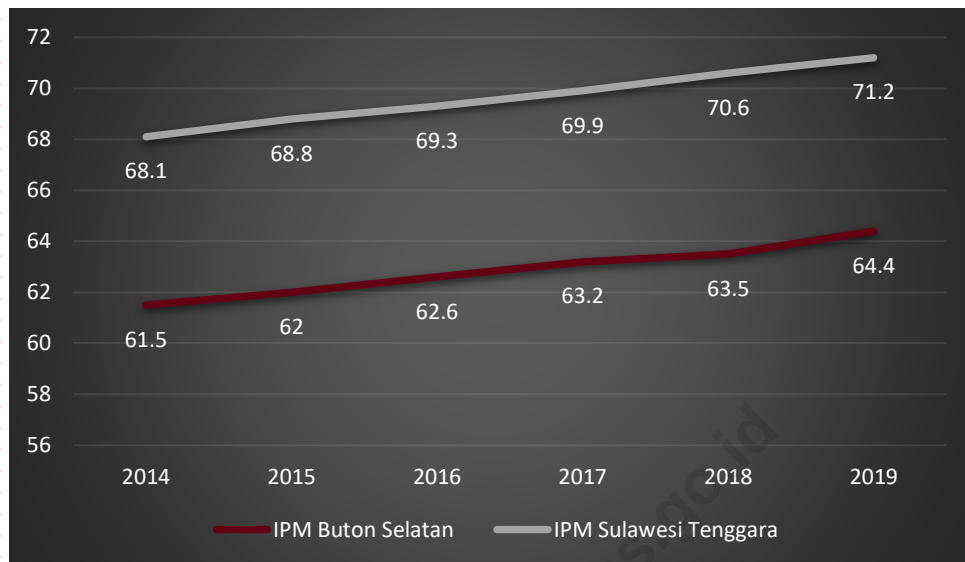
Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2019

Wilayah	IPM 2019	Rangking
(1)	(2)	(3)
Muna	68,97	7
Konawe	71,29	4
Kolaka	73,01	3
Konawe Selatan	67,88	9
Bombana	65,65	13
Wakatobi	68,99	6
Kolaka Utara	68,91	8
Buton Utara	67,68	10
Konawe Utara	69,22	5
Kolaka Timur	66,49	11
Konawe Kepulauan	65,05	14
Muna Barat	64,45	15
Buton Tengah	64,06	17
Buton Selatan	64,37	16
Kota Kendari	82,86	1
Kota Baubau	75,21	2
Sulawesi Tenggara	71,20	

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi tenggara

Dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Sulawesi tenggara, angka IPM Buton Selatan memang masih berada dibawah rata-rata. Akan tetapi, gap yang dihasilkan oleh kedua nilai IPM tersebut pada tahun 2019 lebih kecil dibandingkan tahun 2018, maka pemerintah Buton Selatan perlu lebih serius lagi meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusianya sehingga bukan hal yang mustahil angka IPM Buton Selatan nantinya akan menyusul angka IPM Provinsi Sulawesi Tenggara.

Grafik 4.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2019



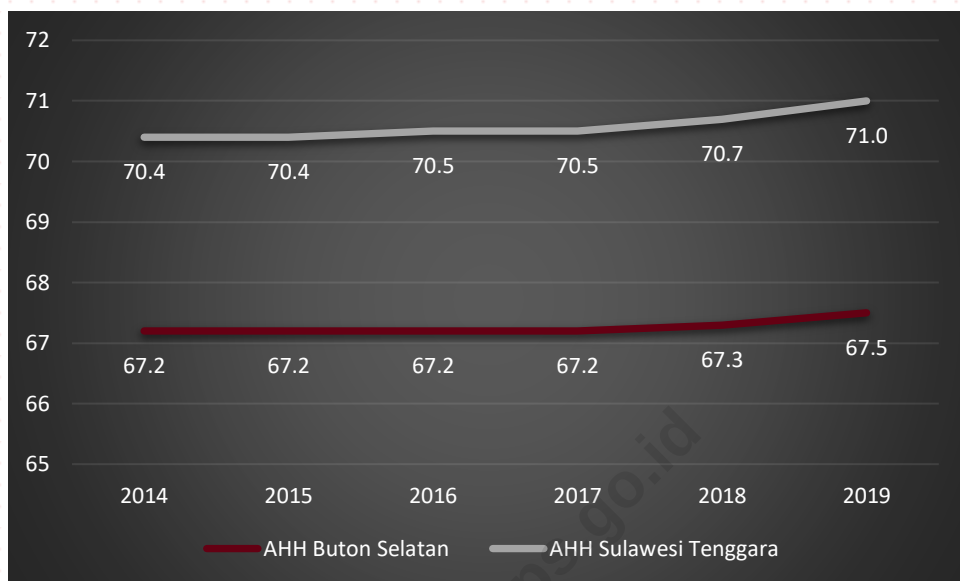
Sumber : BPS Sulawesi Tenggara

4.2.2 Angka Harapan Hidup

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

Secara umum angka harapan hidup di secara umum di Sulawesi Tenggara selalu mengalami kemajuan (Grafik 4.4). Sedangkan di Buton Selatan baru mengalami kenaikan di dua tahun terakhir, sedangkan sebelumnya selalu bertahan di angka 67,2. Di tahun 2019, angka harapan hidup Kabupaten Buton Selatan mencapai 67,5 tahun artinya rata-rata penduduk Kabupaten Buton Selatan dapat menjalani hidup selama 67 hingga 68 tahun. Namun jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, angka harapan hidup Kabupaten Buton Selatan masih lebih rendah dimana angka harapan hidup Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 71 tahun.

Grafik 4.3 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Sulawesi Tenggara

Selain membandingkan secara spasial, kemajuan angka harapan hidup juga dapat digambarkan dengan membandingkannya antar tahun. Perkembangan angka harapan Buton Selatan tahun 2019 tercatat mengalami peningkatan sekitar 0,2 persen dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 67,6. Peningkatan angka harapan hidup tersebut lebih rendah bila dibandingkan peningkatan angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 yang mencapai 0,3 persen.

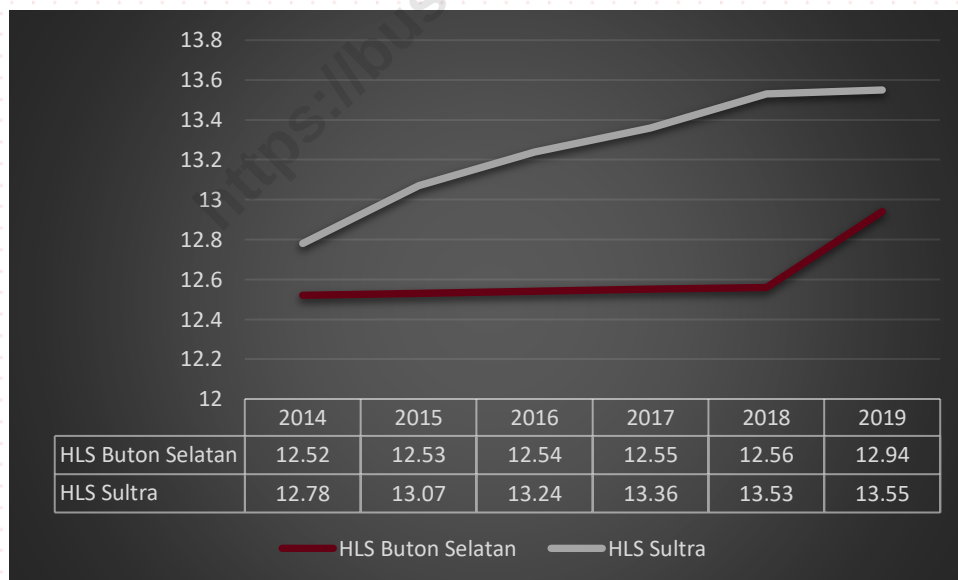
4.2.3 Harapan Lama Sekolah

Perkembangan komponen pendidikan direpresentasikan oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk untuk menempuh

pendidikan formal. Bobot kedua indikator ini memiliki porsi yang sama dalam menyusun angka IPM, yaitu masing-masing menyumbang setengah dalam membentuk komponen pendidikan.

Harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 mencapai 12,94 tahun atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 12,56 tahun dan 12,55 tahun. Selama tahun 2014-2019, harapan lama sekolah Buton Selatan mengalami peningkatan sebesar 1,03 tahun atau dengan kata lain angka harapan lama sekolah Kabupaten Buton meningkat sebesar 8,26 persen. Gambar 4.5 menunjukkan harapan lama sekolah di kabupaten Buton Selatan pada tahun 2014-2019.

Grafik 4.4 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Sulawesi Tenggara

Jika dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, angka yang dicapai oleh Buton Selatan masih berada di bawah rata-rata provinsi dimana angka harapan lama

sekolah Sulawesi Tenggara sebesar 13,55 tahun. Dengan demikian angka harapan lama sekolah Buton Selatan terpaut sekitar 0,61 tahun di bawah angka harapan lama sekolah Sulawesi Tenggara.

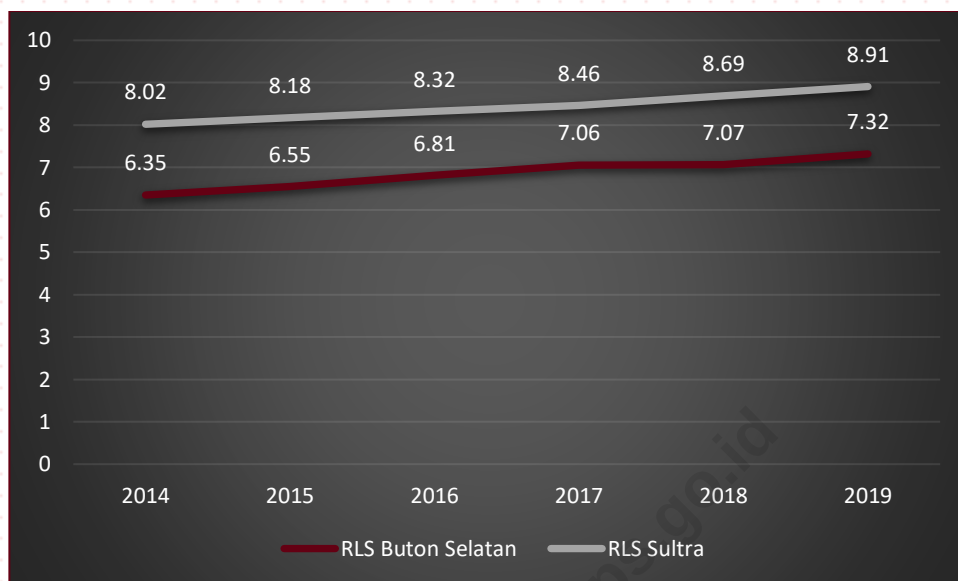
4.2.4 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Oleh karenanya, peningkatan fasilitas pendidikan yang dilakukan saat ini tidak akan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah untuk saat ini namun untuk rata-rata lama sekolah kedepannya.

Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton Selatan mencapai 7,31 tahun atau mengalami peningkatan sebesar 0,25 tahun dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan tahun 2018 (Gambar 4.5). Artinya rata-rata penduduk Buton Selatan hanya mengenyam pendidikan hingga setara tingkat SMP kelas satu, atau mengalami putus sekolah ketika berada di kelas dua SMP. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, rata-rata lama sekolah untuk kabupaten Buton Selatan masih terpaut 1 jenjang di bawah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 sebesar 8,91 tahun.

Jika dilihat perkembangan dari tahun 2010 hingga 2019, angka rata-rata lama sekolah untuk Kabupaten Buton Selatan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Angka pertumbuhannya telah mencapai 15,3 persen sejak tahun 2014. Namun jika dibandingkan dengan RLS Provinsi Sulawesi Tenggara, terlihat bahwa angka RLS Kabupaten Buton Selatan masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Grafik 4.5 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2019



Sumber : BPS Sulawesi Tenggara

4.2.5 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

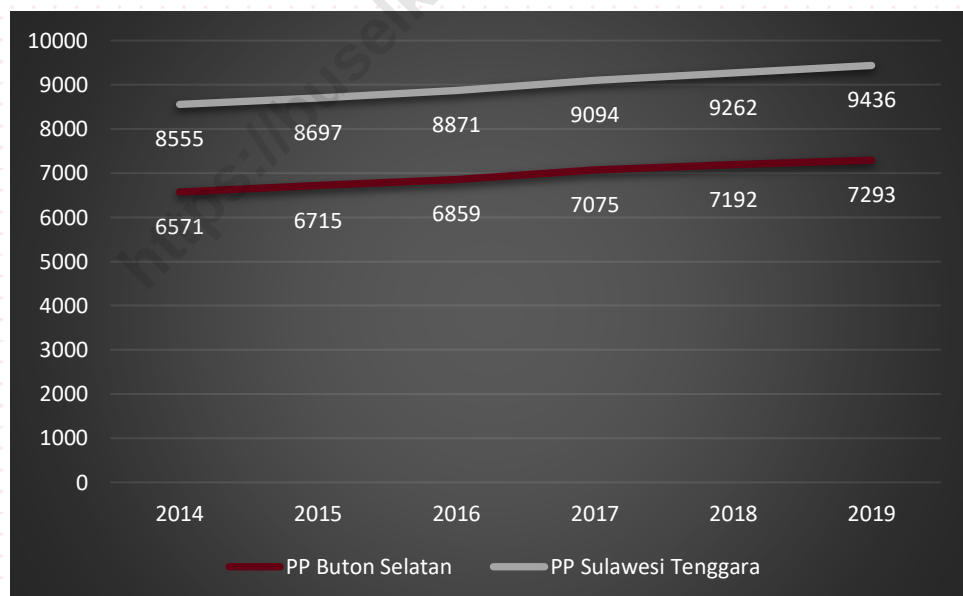
Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah dimensi ekonomi yaitu kemampuan untuk memiliki kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi daya beli, BPS menggunakan konsumsi perkapita sebagai variabel proksi pengukuran pendapatan perkapita. Komponen ini diukur melalui pendekatan pengeluaran per kapita disesuaikan. Adapun perhitungannya ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Daya beli didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk memperoleh barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli masyarakat tersebut.

Dalam penghitungan pengeluaran per kapita disesuaikan, rata-rata pengeluaran per kapita dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Adapun rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan menggunakan tahun dasar 2012=100. Paritas daya

beli telah menggunakan harga yang telah distandarkan dengan kondisi Jakarta Selatan sebagai rujukannya. Penggunaan standar harga ini untuk mengeliminasi perbedaan harga antar wilayah sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat diperbandingkan.

Pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun Kabupaten Buton Selatan (Gambar 4.6) tahun 2019 adalah sebesar Rp 7.293.000. Angka tersebut naik dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 7.192.000. Pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Buton Selatan terus mengalami peningkatan sebesar Rp 0,7 juta dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp. 6,6 juta.

Grafik 4.6 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Sulawesi Tenggara

Jika dilakukan analisis antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara atau secara spasial, Kabupaten Buton Selatan menempati urutan kelima belas dalam hal tingginya pengeluaran per kapita disesuaikan atau di posisi tiga terbawah. Posisi Buton Selatan

berada di atas Kabupaten Buton Tengah, dan Konawe Kepulauan. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata kabupaten di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan memiliki angka pengeluaran per kapita disesuaikan yang di bawah rata-rata angka Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu artinya kemampuan daya beli masyarakat Buton Selatan berada di bawah rata-rata kabupaten lain di Sulawesi Tenggara.

Tabel 4.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2019

Wilayah	AHH	HLS	RLS	PP
Buton	67.90	13.74	7.51	Rp 7,366.00
Muna	70.20	13.78	8.35	Rp 8,253.00
Konawe	70.00	12.99	9.14	Rp10,200.00
Kolaka	70.70	12.80	8.76	Rp12,525.00
Konawe Selatan	70.50	12.24	7.74	Rp 9,115.00
Bombana	68.50	11.83	7.74	Rp 8,344.00
Wakatobi	70.10	13.20	7.73	Rp 9,388.00
Kolaka Utara	70.20	12.10	7.86	Rp10,258.00
Buton Utara	70.80	12.75	8.75	Rp 7,534.00
Konawe Utara	69.20	12.54	8.97	Rp 9,215.00
Kolaka Timur	72.30	12.15	7.35	Rp 7,832.00
Konawe Kepulauan	68.30	11.81	9.18	Rp 6,832.00
Muna Barat	70.20	12.20	6.77	Rp 7,526.00
Buton Tengah	67.50	12.70	7.29	Rp 7,264.00
Buton Selatan	67.50	12.94	7.32	Rp 7,293.00
Kota Kendari	73.50	16.28	11.94	Rp14,392.00
Kota Baubau	71.00	14.81	10.37	Rp10,523.00
Sulawesi Tenggara	71.00	13.55	8.91	Rp 9,436.00

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

IPM Kabupaten Buton Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 IPM Kabupaten Buton Selatan sebesar 63,47 menjadi 64,37 pada tahun 2019. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan seluruh komponen IPM di Kabupaten Buton Selatan yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

IPM Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 masih terbilang cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya, dimana Kabupaten Buton Selatan menempati peringkat ke enam belas atau posisi dua terbawah. Namun demikian, IPM Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 termasuk dalam kategori sedang yaitu nilai IPM berada di rentang $60 \leq \text{IPM} \leq 70$.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://buselkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BUTON**

Jl. Protokol, Kel. Saragi, Kec. Pasarwajo, Buton

Email: bps7401@bps.go.id

Homepage: <http://buselkab.bps.go.id>

ISBN 978-602-5602-33-7

